

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sempurna seperti kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang maupun papan. Menurut Wulandari et al., (2022) Kemiskinan adalah salah satu masalah global yang dipahami dari berbagai sudut pandang, yang paling utama adalah pandangan kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Aprilia & Sembiring, (2021) juga mengatakan bahwa salah satu ciri adanya kemiskinan adalah karena ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan.

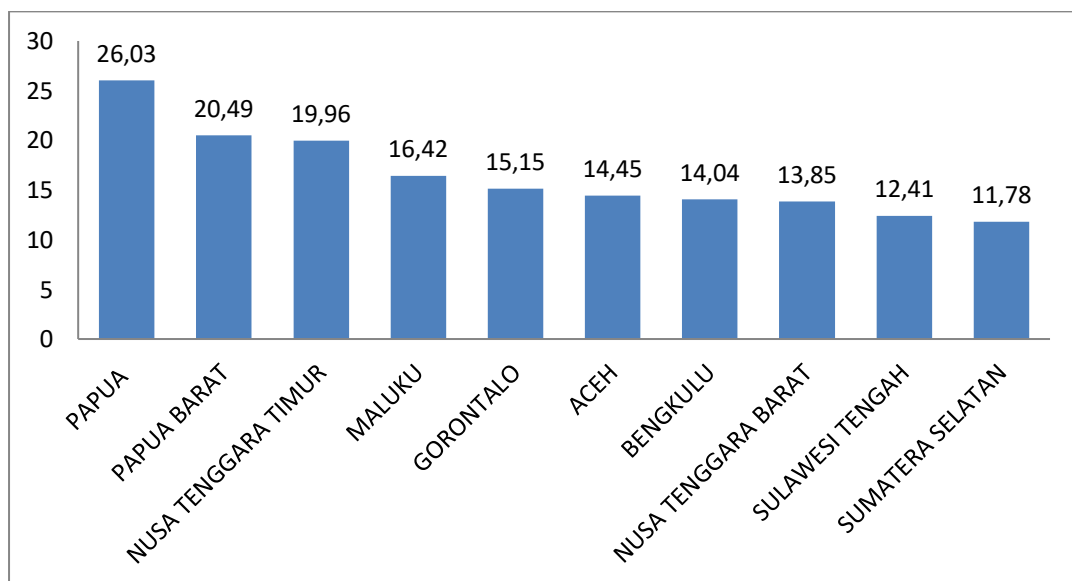
Fenomena kemiskinan sudah tidak asing lagi ditemui disetiap belahan dunia terutama pada negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia menempatkan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan, efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih instrumen pembangunan (Suhandi et al.,2018). Menurut Astrini & Purbadharmaja, (2013) Kemiskinan di Indonesia sangat sulit dilepaskan, bahkan semakin membelit dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Setiap Kabupaten/Kota di wilayah Aceh memiliki karakteristik yang berbeda. Sesuai yang dikatakan Nufus & Husein, (2021) Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota dan dalam beberapa aspek terdapat berbagai perbedaan karakteristik antara Kabupaten maupun Kota. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap banyaknya jumlah penduduk miskin. Letak geografis dan keanekaragaman sumber daya alam di Kabupaten/Kota di Aceh memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan dasar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sebaliknya, Kabupaten-Kabupaten yang terletak di wilayah terpencil atau yang mengandalkan sektor rentan seperti pertanian dan perikanan serta yang lebih rawan terhadap bencana akan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Memilih Provinsi Aceh sebagai objek penelitian karena Aceh merupakan sebuah wilayah yang memiliki karakteristik potensi sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap daerah di Provinsi Aceh. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Menurut Herlina & Manduapessy (2023) Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah dapat mengakibatkan perbedaan tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu wilayah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan

bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Kemiskinan di Provinsi Aceh hingga saat ini masih belum terselesaikan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Hasballah (2021) bahwa Provinsi Aceh sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia yang belum terlepas dari masalah kemiskinan sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2023 Provinsi Aceh menempati kemiskinan pada urutan ke 6 di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat grafik dibawah ini:



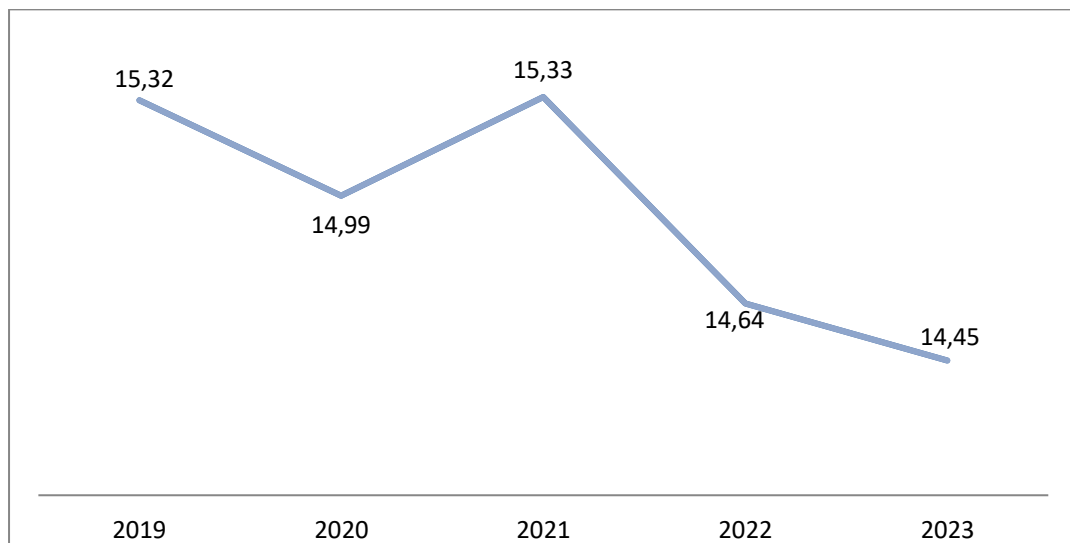
Gambar 1. 1 Penduduk Miskin Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2025

Dapat dilihat dari Grafik 1.1 diatas menjelaskan ada 10 dari 38 Provinsi di Indonesia yang mempunyai persentase penduduk miskin terbanyak dan Provinsi Aceh berada pada urutan ke 6 dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,45% Pada tahun 2023. Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan Aceh hal itu dapat terjadi karena disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan

di Provinsi Aceh seperti dampak pasca bencana alam tsunami, infrastruktur dan pembangunan yang kurang memadai, dan keterbatasan lapangan kerja.

Meskipun saat ini Aceh masih termasuk kedalam salah satu Provinsi yang memiliki kemiskinan yang tinggi di Indonesia setelah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo namun pada tahun 2023 di Provinsi Aceh tingkat kemiskinan telah menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2019-2023:



Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Persen)

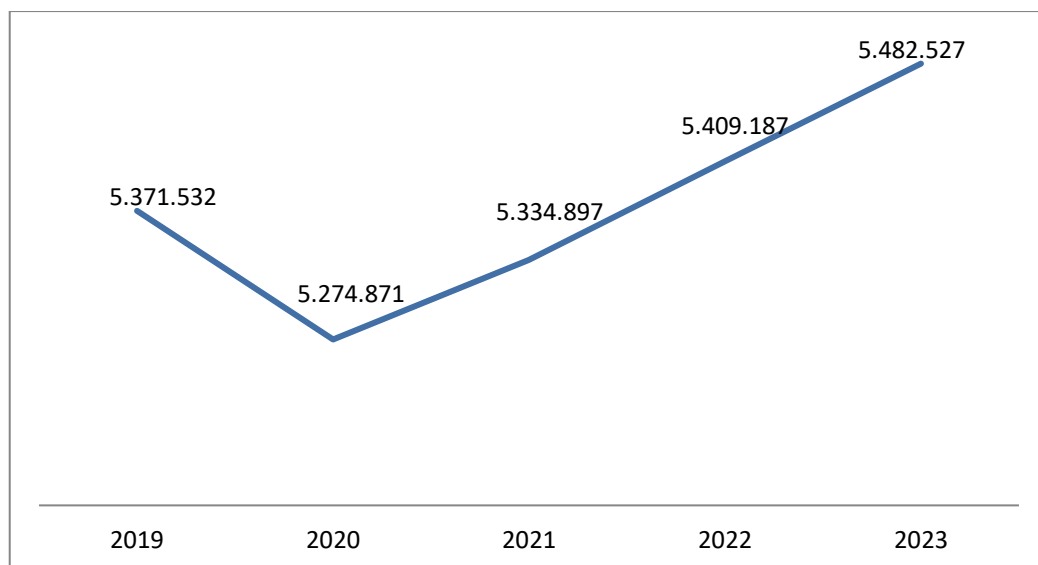
Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan Grafik 1.2 diatas, Dapat dilihat bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 15,32%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14,99%. Hal ini dikarenakan adanya bantuan dana desa yang diberikan kepada masyarakat Aceh sebesar Rp72 Trilliun lebih besar dari pada dana desa tahun sebelumnya dengan peraturan pemerintah Aceh yang

mengeluarkan peraturan daerah dengan menyerukan dana desa tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan warga dan investasi pada usaha UMKM. Pada tahun 2021 kemiskinan di Provinsi Aceh meningkat sebesar 15,33% diakibatkan adanya dampak covid-19 yang melanda Provinsi Aceh sehingga banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami pengangguran, ditahun 2022 terjadi penurunan kembali sebesar 14,64%. Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh disebabkan karena peningkatan produksi padi di Aceh dari 152,26 ribu ton pada september 2021 menjadi 249,19 ribu ton pada maret 2022, sebagaimana tercatat dalam data Kerangka Sampel Area (KSA) bahwa produksi padi berpotensi memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan petani, membaiknya akses terhadap pangan, serta tersedianya lapangan kerja di sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk miskin di wilayah tersebut serta diikuti dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum, yaitu pada maret 2022 meningkat 3,88% dibanding september 2021 dan di tahun 2023 kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 14,45%. Dari hal diatas menyatakan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh setiap tahun mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tersebut.

Ristika et al., (2021) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan jumlah individu yang mendiami suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Jumlah penduduk secara umum dapat diartikan sebagai total semua orang

yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara (Yenny & Anwar, 2020). Pada dasarnya banyak sedikitnya jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi kemiskinan disuatu wilayah, seperti yang dikatakan oleh Suhandi et al., (2018) jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan masalah yang mendasar, Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang besar juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian ketersediaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh angkatan kerja sehingga banyaknya pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan. Banyaknya jumlah penduduk dalam usia kerja yang menganggur merupakan konsekuensi terjadinya kemiskinan (Seran, 2017). Berikut perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Aceh :



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Jiwa)

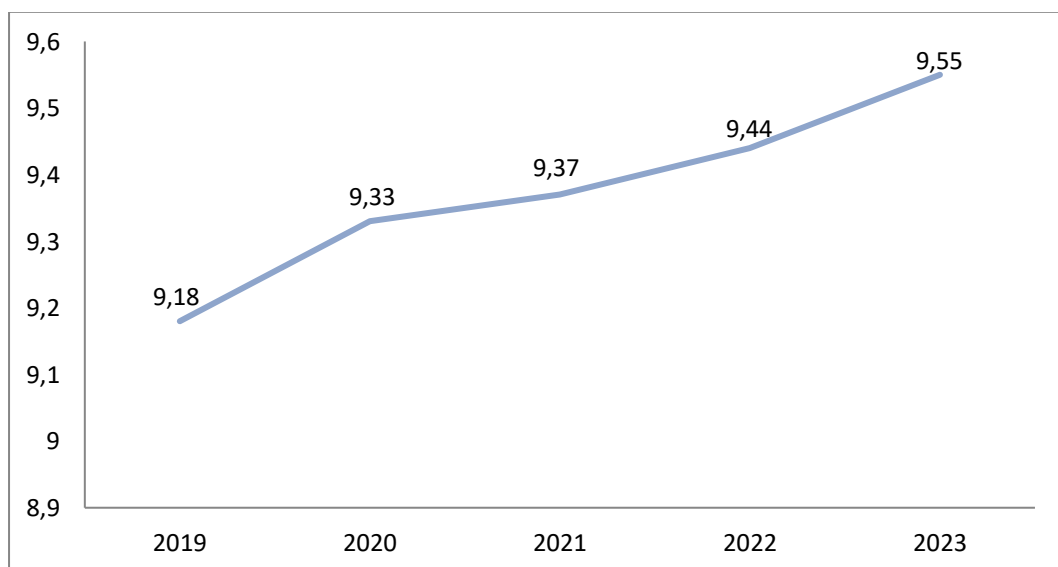
Sumber: BPS dan Open data Aceh, 2025

Berdasarkan Grafik 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 jumlah penduduk provinsi Aceh sebesar 5.371.532 jiwa, Tahun 2020 menurun sebesar 5.274.871 jiwa. Hal ini dikarenakan tingginya angka kematian secara alami maupun dikarenakan dampak covid-19, pada 2021 meningkat sebesar 5.334.897 jiwa kemudian pada tahun 2022 meningkat sebesar 5.409.187 jiwa dan pada tahun 2023 meningkat lagi hingga mencapai 5.482.527 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Aceh pada 2023 dapat diakibatkan karena relatif tingginya tingkat kelahiran dari pada kematian. Pertumbuhan penduduk alami merupakan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu kelahiran dan kematian. Ketika tingkat kelahiran lebih tinggi daripada kematian, maka populasi akan mengalami pertumbuhan (Bidarti, 2020). Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian di suatu wilayah salah satunya yaitu kemiskinan. Menurut Hasibuan et al., (2022) Peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kemiskinan sebab peningkatan jumlah penduduk terlalu cepat akan menjadi permasalahan serius jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk namun sebaliknya jika pertumbuhan penduduk dibarengi dengan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang baik akan membawa masyarakat pada kesejahteraan yang dapat menurunkan kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat diperoleh melalui kegiatan mempertajam pengetahuan dan keterampilan melalui proses pendidikan.

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan seseorang melalui instansi formal maupun non-formal dengan tujuan untuk mengasah potensi dan karakter yang ada didalam diri seseorang (Agustina & Ps, 2019). Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang bermanfaat untuk membuat inovasi dan keterampilan baru yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan sehingga pembangunan daerah tersebut juga akan mudah untuk dicapai. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati dikemudian hari (Susanto & Pangesti, 2019). Berikut data tingkat pendidikan di Provinsi Aceh:



Gambar 1. 4 Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Tahun)

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan Grafik 1.4 diatas dapat dilihat tingkat pendidikan di Provinsi Aceh mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada tahun 2019 tingkat pendidikan di Provinsi Aceh sebesar 9,18 tahun, Pada tahun 2020 sebesar 9,33 tahun, kemudian pada tahun 2021 tingkat pendidikan menjadi sebesar 9,37 tahun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,44 tahun dan tingkat pendidikan di Provinsi Aceh meningkat sebesar 9,55 tahun pada tahun 2023.

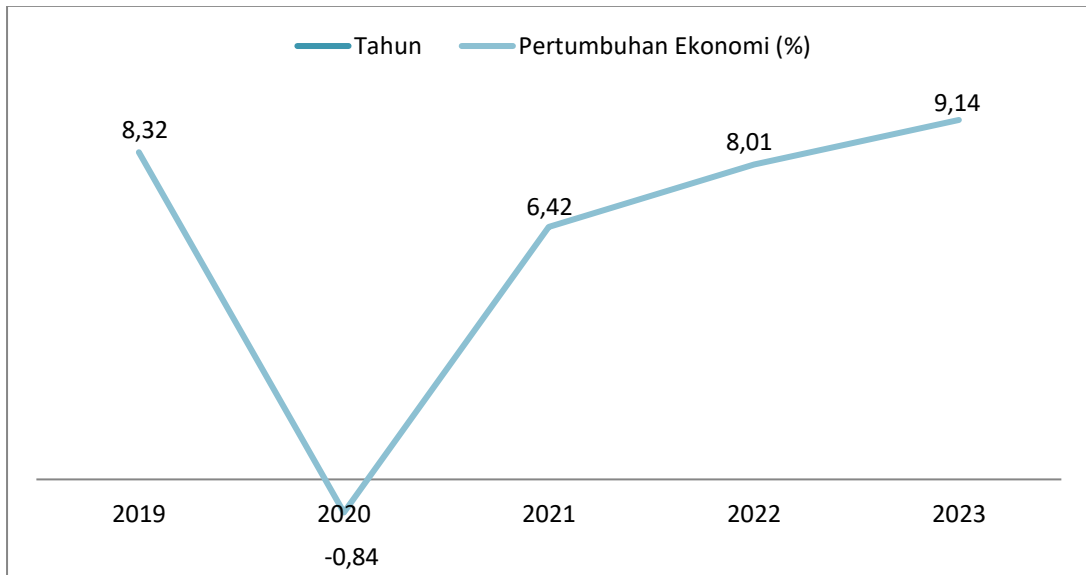
Pendidikan di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya pengalokasian dana besar untuk pendidikan termasuk Dana Otonomi Khusus dan dana tambahan hasil Migas yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan peningkatan fasilitas. Selain itu, adanya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (Kip-K) dan beasiswa Aceh Carong (Dinas Pendidikan Aceh, 2022).

Safitri & Effendi, (2019) menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk menyiapkan salah satu input dalam faktor produksi yaitu tenaga kerja, agar bekerja lebih produktif melalui peningkatan kualitasnya. Mereka juga mengatakan melalui pendidikan maka keterampilan dan keahlian akan meningkat, sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kerja yang dihasilkan. Pendidikan juga merupakan *human capital* semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan (Wahyudi & Rejekingsih, 2013).

Pendidikan sangatlah penting dalam menekan angka kemiskinan, dengan adanya pendidikan seseorang akan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja dan lebih memiliki kemampuan untuk melakukan produktivitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor utama yang mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pendidikan tersebut didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Subroto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu latar belakang terciptanya pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah sebuah peningkatan kemampuan suatu daerah atau wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Sukirno (2010) dalam Winarto et al., (2022) mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan pengembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan perubahan ekonomi yang bertahap menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran hasil kerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan bisa diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan suatu daerah (Juwita & Widia, 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Mereka menambahkan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur dalam menilai gambaran keberhasilan dari

kebijakan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Pertumbuhan itu sendiri merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang disertai aspek dinamis dalam suatu perekonomian (Pananrangi, 2012). Berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 :



Gambar 1. 5 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2025

Pada Grafik 1.5 diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2020. Pada tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,32%, pada tahun 2020 menurun secara drastis sebesar -0,84 % dikarenakan terjadinya wabah penyakit Covid-19 yang menyerang seluruh dunia yang mengakibatkan merosotnya pertumbuhan ekonomi hampir disetiap wilayah, ditahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 6,42%, dan pada tahun 2022 sebesar 8,01%, kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 9,14% pada tahun 2023.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dikarenakan tingginya investasi. Pejabat gubernur Bustami Hamzah mengatakan investasi Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp12,57 Triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,68 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,89 Triliun. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga dikarenakan adanya sektor perdagangan besar dan eceran yang mengalami kenaikan hingga mencapai 10,23%, berkat peningkatan penjualan kendaraan bermotor pada akhir tahun dan sektor penyediaan akomodasi makanan minuman juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 9,16% yang dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan bisnis dan pariwisata seperti pekan kebudayaan Aceh dan perjalanan dinas. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan juga terus memberikan kontribusi positif dan ekspor barang serta konsumsi rumah tangga turut mendukung laju pertumbuhan ekonomi Aceh.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan gambaran dari meningkatnya kesejahteraan wilayah tersebut. Sesuai dengan yang dikatakan Mellita Sari, (2018) bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila kegiatan ekonomi terus meningkat. Hal ini dapat dikatakan jika pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang sangat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan pendapatan. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang baik dengan terciptanya kegiatan produksi barang dan jasa serta ketersediaan lapangan kerja dapat menurunkan kemiskinan (Pangiuk, 2018).

Berdasarkan dari variabel-variabel yang telah dipilih diatas seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada

tahun 2023 telah mengalami peningkatan dan kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi lain Aceh masih merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kemiskinan yang tinggi di Indonesia.

Sejauh ini sudah ada beberapa peneliti yang meneliti mengenai kemiskinan yang berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., (2021) menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Berliani, (2021) menunjukkan bahwa perhitungan baik secara parsial bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Barat dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Utami et al (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada penelitian Kansil et al (2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial memiliki tanda positif berpengaruh, dan tingkat pendidikan secara parsial memiliki tanda negatif berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian yang berubah dari waktu ke waktu membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh ?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
3. Seberapa besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh?
4. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun Manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberi pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan terkait wilayah pada penelitian ini.
2. Hasil Penelitian dapat memperdalam teori karena penulisan ini dilakukan dengan menggunakan sumber referensi yang relevan dan terpercaya serta berguna untuk kegiatan pembelajaran peneliti sendiri dan fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan. misalnya, dengan mengendalikan jumlah penduduk, meningkatkan akses pendidikan atau mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta acuan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti hal serupa mengenai kemiskinan